

Opini

Budaya Seragam dan Terorisme

Oleh Dr. Otto Gusti Madung, Staf Pengajar STFK Ledalero, Maumere-Flores

SENIN, 24 AGUSTUS 2009 | 16:31 WITA

PETER, seorang anak kelas V sebuah sekolah dasar di Flores, setelah mengikuti apel perayaan 17 Agustus pulang ke rumah sambil menggerutu, "Disiplin, disiplin, disiplin melulu... Capai ikut kegiatan berbaris! Tangan harus diayun setinggi bahu lagi. Seperti robot saja!"

Seorang profesor asal Jerman yang sedang membuat penelitian tentang suara manusia di salah satu suku asli di Papua Barat merasa heran menyaksikan adegan baris-berbaris para pelajar di Indonesia menjelang perayaan 17 Agustus. Lebih terkejut lagi melihat khususnya orang-orang mengikuti perayaan pengibaran bendera. "Seolah-olah sedang beradorasi di depan sakramen mahakudus," katanya. Untung saja bendera merah putih belum diukupi!

Adegan ini mengingatkan profesor tadi akan regim totalitarian Nazi Jerman dan budaya seragamnya. Hitler menghendaki keseragaman. Tak ada ruang bagi individualitas dan ekspresi kebebasan. Yang tidak tunduk di bawah budaya seragam dianggap subversif dan musuh negara. Militerisasi ada di mana-mana.

Militerisasi ruang publik pernah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita selama regim orde baru (Orba). Masa ini ditandai dengan sakralisasi upacara kenegaraan dan politisasi atau akbarisasi upacara keagamaan. Harmoni dan budaya seragam dipandang sebagai keutamaan moral warga negara. Tapi setelah 30 tahun akhirnya kita sadar, ideologi harmoni dan budaya seragam ternyata tidak lebih dari instrumen pembungkaman kebebasan dan legitimasi atas penindasan oleh sebuah regim yang korup.

Namun 11 tahun pasca reformasi dan gerakan demokratisasi bergulir di negeri ini, budaya seragam, ideologi baris-berbaris dan militerisasi ruang publik tetap bertebaran di mana-mana. Apa makna semuanya ini di tengah perjuangan seluruh anak bangsa membangun sebuah tatanan yang demokratis atas dasar penghargaan terhadap faham hak-hak asasi manusia?

Penulis berpendapat, kebiasaan baris-berbaris untuk para pelajar, anak sekolah dan warga sipil pada umumnya menjelang perayaan 17 Agustus tidak sepatutnya diteruskan. Saya tidak melihat makna di balik kegiatan itu selain penerapan gaya militeristik di ruang publik yang seharusnya bersih dari distorsi kekuasaan. Disiplin dan budaya seragam yang menjadi pesan ritus baris-berbaris tidak sesuai dengan roh gerakan demokratisasi dan penegakan HAM yang tengah dan terus diperjuangkan bangsa ini.

Ideologi

Seragamisasi dan militerisasi ruang publik yang terungkap lewat latihan baris-berbaris juga sangat kontraproduktif di tengah perjuangan pemerintah dan bangsa Indonesia memerangi bahaya terorisme. Kita tentu menghargai dan patut memberikan apresiasi atas keseriusan dan prestasi pemerintah Indonesia dan kinerja Polri membongkar jaringan teroris. Sebab, aksi teror di Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton sungguh mencoreng wajah bangsa Indonesia. Seolah-olah bangsa ini sudah terlalu akrab dengan kekerasan dan barbarisme.

Kita perlu melakukan upaya preventif holistik mengatasi terorisme di Indonesia. Menangkap para pelaku teror belum berarti kita sudah bebas dari bahaya terorisme. Sebab aksi kekerasan para pelaku bom bunuh diri hanyalah puncak sebuah gunung es.

Perlawanan terhadap terorisme harus mampu menyentuh persoalan lebih mendasar, yakni ideologi teror itu sendiri. Hanya dengan membongkar sisi ideologis, terorisme dapat dibasmi hingga ke akar-akarnya. Hannah Arendt (1906-1975), seorang filsuf Yahudi dan pernah menjadi korban teror regim Nazi Jerman, berpendapat, akar terorisme adalah *Gefuehl der Verlassenheit* - perasaan ditinggalkan (Hannah Arendt, *Elemente und Urspruenge totaler Herrschaft*, Muenchen 1996, hlm. 729) Perasaan ditinggalkan muncul ketika manusia tidak mampu lagi beradaptasi dengan gaya hidup moderen. Manusia merasa ditinggalkan karena peradaban moderen telah menghancurkan cara-cara hidup tradisional, adat-istiadat, kebiasaan dan institusi yang diwariskan turun-temurun. Modernitas telah mengosongkan agama-agama dan tatanan hidup tradisional dari substansinya.

Perkembangan masyarakat industri mendatangkan alienasi bagi umat manusia. Pekerjaan-pekerjaan tradisional tidak mendapat tempat lagi dalam masyarakat industri. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan terhempas seketika ke dalam kubangan kemiskinan.

Mobilitas adalah ciri masyarakat industri. Manusia dipaksa untuk fleksibel dan harus siap dipindahkan setiap saat. Akibatnya, banyak orang kehilangan sahabat. Ikatan keluarga jadi rapuh yang bermuara pada perceraian dan hancurnya tatanan keluarga tradisional. Banyak orang merasa kesepian.

Manusia yang dirundung kesepian eksistensial, demikian Arendt, mulai mencari perlindungan dalam komunitas primordial. Maka lahir dan berkembanglah kelompok-kelompok primordial di Eropa pada abad 19 dan 20 seperti sosialisme, nasionalisme dan fasisme. Ketiga bentuk primordialisme ini memberikan penekanan pada kolektif atas dasar kesadaran kelas, ras atau bangsa.

Primordialisme Eropa telah mencatat lembaran buram sejarah peradaban moderen dan menciptakan mesin industri kematian pada abad ke-20 yang kita kenal dengan nama Gulag, Auschwitz, Dachau, Mauthausen serta deretan nama kamp konsentrasi lainnya. Di tempat-tempat ini telah terjadi pembantaian individu-individu atas nama sebuah keseragaman kolektif.

Bagaimana mungkin seorang individu bisa tunduk dan taat secara buta pada sebuah kolektivisme primordial? Menurut Arendt, manusia yang dilanda 'perasaan ditinggalkan' akan mengikuti 'der Fuehrer - Sang Pemimpin' dengan penuh antusias. Secara suka rela mereka merendahkan diri di hadapannya dan membiarkan diri berada di bawah paksaan totaliter. Dengan itu mereka diharapkan dapat dibebaskan dari segala keraguan dan kesepian. Ketaatan buta terhadap sang *Fuehrer* memberinya kepastian hidup.

Ketaatan buta pada sang *Fuehrer* mampu mentransformasikan individu-individu menjadi onggokan massa. Dalam massa individu-individu tampil seragam, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Yang paling tinggi hanyalah sang Fuehrer.

Di tangan sang Fuehrer, mesin birokrasi kekuasaan teror mengubah massa menjadi sebuah gerakan tak terkendalikan. Sebuah gerakan destruktif yang menghancurkan yang lain, yang tidak bersedia masuk dalam barisan pasukan seragam. Massa menjadi pelindung sekaligus pegangan hidup terakhir bagi anggota-anggotanya.

Massa itu berharap, mereka akan mampu mengatasi 'perasaan ditinggalkan', rasa sepi jika mampu membawa korban yang sama. Bila perlu korban hidupnya sendiri. Hanya lewat pengorbanan tanpa pamrih dan kepatuhan buta mereka temukan komunitas dan pegangan hidup.

Budaya Seragam versus Solidaritas

Para teroris hidup dalam ketaatan buta dan tanpa pamrih pada sang Fuehrer. Ketaatan buta terhadap seorang pemimpin hanya mungkin bertumbuh dalam budaya seragam. Ketika harmoni harus diperjuangkan dengan mengorbankan nilai-nilai lainnya, daya berpikir kritis menjadi tumpul. Kebebasan berpendapat dan pluralitas dipandang sebagai scandalum magnum.

Figur sang Fuehrer dapat hadir lewat konsep-konsep absolutistis dalam agama, ideologi, politik atau ekonomi. Di sini tak ada ruang untuk berbeda, yang ada hanyalah keseragaman seperti harmoni ayunan tangan setinggi bahu waktu latihan baris-berbaris. Di sini absolutisme berkembang dan pada gilirannya menjadi lahan subur tempat bersemainya benih-benih terorisme.

Absolutisme tidak pernah membuka ruang komunikasi. Sebab komunikasi selalu mengandaikan kebebasan dan pluralitas. Budaya seragam menghilangkan perbedaan antarmanusia, menyamaratakan semua manusia dan melenyapkan individualitas. Budaya seragam yang mulai dibangun lewat latihan baris-berbaris adalah penghancuran segala bentuk pluralisme. Atau dalam bahasa Arendt, seragamisasi tidak membiarkan munculnya *Zwischenraeume* - 'ruang-ruang antara' antarmanusia yang memungkinkan adanya komunikasi. Yang ada hanyalah pembungkaman atas kritik dan perlawanan.

Politik massa adalah politik kekerasan karena ia hanya dapat dibangun atas dasar penghancuran individu. Maka 'Gefuehl der Verlassenheit - perasaan ditinggalkan' sebagai akar terorisme tak dapat diselesaikan dengan politik massa yang menyeragamkan manusia, tapi dengan perluasan ruang solidaritas. Pembangunan harus mampu memperluas ruang solidaritas dan meminimalisasi tingkat kemiskinan dan penderitaan. Dalam ruang

solidaritas itu manusia dapat menegaskan dan menentukan dirinya tidak dengan membunuh, tapi 'lewat pengakuan atas kehadiran manusia lain' (F. Budi Hardiman, 2005, hlm. 57).

Penegasan diri dalam jaringan solidaritas hanya mungkin jika setiap individu diberi peluang untuk mengekspresi diri secara bebas dan bertanggung jawab. Hak-hak manusia sebagai individu harus dilindungi. Penggolongan dan diskriminasi manusia atas dasar kategori primordial harus diakhiri. Untuk itu negara harus mampu bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok sektarian dan fundamentalistis yang cenderung memaksakan keyakinannya kepada pihak lain.

Demikian pun produk undang-undang yang intoleran dan cenderung totaliter karena mengatur moralitas pribadi warga sudah saatnya untuk ditinjau kembali secara kritis demi terciptanya bangsa Indonesia yang moderat, santun, toleran, cinta perdamaian dan kemanusiaan. *